

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *SUKA-Press* (1 ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Aksinudin, S. (2022). *Hukum Pertanahan: Mengurai Kompleksitas Problem Pertanahan di Indonesia* (Pertama). Inteligensia Media.
- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum* (Kedua). PRENADAMEDIA GROUP.
- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, AgustinMR, Y., Faisal, A., Gunawan, Mubaroq, H., & Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (M. Akib, Maroni, & Hamzah (ed.); Pertama). CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny).
- Arba. (2019). *Hukum Agraria Indonesia* (Tarmizi (ed.); keenam). Sinar Grafika.
- Bachtiar. (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM* (O. Yanto (ed.); 1 ed.). UNPAM PRESS.
- Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah*.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2018). *Buku Ajar*

*Politik Hukum Pertanahan (Pertama)*. Airlangga University Press.

Hardani, Andnriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1 ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Iftitah, A. (2021). *Konflik Agraria: Seri Pelaksanaan Hukum Tanah Terindikasi Terlantar Di Blitar* (Guepedia/La (ed.); Pertama). Guepedia.

Indrajaya, R., Kontesa, E., & Indrajaya, R. A. P. (2020). *Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik* (R. Trisnadewi (ed.); 1 ed.). PT Refika Aditama.

Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Efendi (ed.); Pertama). Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada.

Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Kesatu)*. Alfabeta Bandung.

Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Z. M. Fauzan (ed.); Pertama). KENCANA.

Muchsin, Koeswahyono, I., & Soimin. (2019). *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (Anna (ed.); Keempat). PT Refika Aditama.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram University Press.

Mujiburohman, D. A. (2019). *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendaayagunaan Tanah Terlantar* (Tim STPN Press (ed.)). STPN Press.

- Mustofa, & Suratman. (2018). *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri* (Tarmizi & Jyalita (ed.); Kedua). Sinar Grafika.
- Muwahid. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia* (1 ed.). UIN SA Press.
- Novyta, U., Yosia, H., & Kesaulya, C. (2021). *Buku Ajar Hukum Agraria* (Pertama). Penerbit Lakeisha.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., Rozaini, N., Tanjung, R., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan* (R. Watrionthos (ed.); 1 ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Purwanti, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (L. Tika (ed.); Pertama). CV. Jakad Media Publishing.
- Qamar, N., Aswari, A., Djanggih, H., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (A. K. Muzakkir (ed.); Pertama). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2019). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* (Keenam). Penerbit Nuansa Cendekia.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Keenam). KENCANA.
- Sirajuddin, & Winardi. (2015). *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (1

ed.). Setara Press.

Wiryani, F. (2018). *Hukum Agraria: Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan (Pertama)*. Setara Press.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

## **C. Sumber Hukum Lainnya**

### **1. Jurnal**

- Adhipermana, I. G. A. N. K., & Suryani, I. K. K. A. W. (2022). Pengaturan Penguasaan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Dalam Pembaharuan Agraria. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 328–332.
- Arbani, T. S. (2020). Penataan Perizinan dan Status Perkebunan Tanpa Hak Guna Usaha Di Sulawesi Selatan. *El-Iqtishady*, 2(2), 97–110.
- Christian, P. (2020). Reformulasi Pengaturan Pemberian Hak Guna Bangunan Terhadap Commanditaire Vennootschap. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 54–69.
- Dilapanga, R. A. (2017). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, 6(5), 137–144.
- Kolinug, P. P. . (2017). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex et Societatis*, 7(7), 134–139.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1–9.
- Mujiburohman, D. A. (2016). Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir. *Bhumi*, 2(2), 151–164.
- Nugroho, W. (2017). Rekontruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum. *Legislasi Indonesia*, 14(4), 369–382.

Saefullah, Cangara, H. H., & Salle, A. (2018). Kompleksitas Antara Hak Guna Usaha (HGU) dan Penyelamatan Aset Negara Terhadap Tanah-Tanah Terlantar Melalui Komunikasi (Negoisasi) Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 7(1), 166–174.

Widarbo, K. (2021). Problematika Reforma Agraria Pada Tanah Redistribusi Bekas Hak Guna Usaha Tratak, Batang. *Jurnal Widya Bhumi*, 1(1), 25–38.

Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Legislasi Indonesia*, 17(1), 98–111.

## **2. Skripsi**

Etika, C. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Yang Dirugikan Oleh Penggarap Yang Hanya Memiliki Izin Garap Dari Kepala Desa Di Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria*. Universitas Pasundan Bandung.

## **3. Prosiding**

Dimas, R. (2021). Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0*, 3, 209–216.